

IMPLEMENTAS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MALANG (Studi pada Implementasi PP. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen)

Eka Ayu Intan Permatasari, Hermawan, Mohammad Said

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: asianbrain2609@yahoo.co.id

Abstract: Policy Implementation Transfer of the Capital Regency Malang "(A Study on Implementation of PP. No. 18 of 2008 about Transfer of Capital Kabupaten Malang to Kecamatan Kepanjen). Based on Government Regulation No. 18 of 2008, then implemented transfer of the Capital Kabupaten Malang. To support the success of implementation transfer of the Capital Kabupaten Malang has the aspect of communication between the government and relevant actors, availability aspects of land that can support the implementation transfer of the Capital Regency continuity, aspects of the attitude of the executive in implementing the policy and implementation aspects of the bureaucratic structures. However, some factors are constraining the implementation such the lack of commitment between irrigation department and Cipta Karya departments in directing existing development and lack of budget for implementation transfer of the Capital Regency.

***Keyword:** policy implementation, capital regency*

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang (Studi pada Implementasi PP. No 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen). Berdasarkan PP No 18 Tahun 2008 maka dilaksanakan pemindahan Ibukota Kabupaten. implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang telah memperhatikan aspek komunikasi antara pemerintah dengan aktor terkait, aspek ketersediaan lahan yang dapat mendukung keberlangsungannya implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten, aspek sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dan aspek struktur birokrasi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat faktor penghambat antara lain adalah kurangnya komitmen antara dinas pengairan dan dinas cipta karya dalam mengarahkan pembangunan yang ada dan minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten.

Kata kunci: implementasi kebijakan, ibukota kabupaten

Pendahuluan

Kebijakan mengenai pemindahan ibukota Kabupaten telah dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satu daerah yang telah memindahkan ibukota kabupaten adalah Malang. Dalam perkembangannya keberadaan ibukota Kab, yang selama ini berada di Kota dianggap kurang sejalan dengan kebijakan Kab. Malang yang telah melakukan pembangunan. Oleh karena itu, dari hasil lapangan secara keseluruhan, Kecamatan Kepanjen dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Malang. Pada tahun 2008 telah disahkan secara yuridis formal dalam bentuk Perppm RI Nomor 18 Th 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Ke Kec. Kepanjen.

Berdasarkan penjelasan di atas wilayah kota Administratif Malang dibentuk menjadi Kecamatan Kepanjen, yang lepas dari wilayah

kota Malang. Dengan semangat untuk membangun Kabupaten Malang yang lebih sejahtera, maka diputuskan untuk segera memindahkan ibukota Kabupaten di Kecamatan Kepanjen. Pemindahan ibukota Kabupaten juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Malang. Kecamatan Kepanjen mempunyai luas keseluruhan 4.624.40 Ha. Secara administratif, Kecamatan Kepanjen terbagi menjadi 18 kelurahan/desa yaitu Kelurahan Kepanjen, Kelurahan Cempokomulyo, Kelurahan Panarukan, Kelurahan Ardirejo, Desa Dilem, Desa Ngadilangkung, Desa Mojosari, Desa Jatirejoyoso, Desa Curungrejo, Desa Sukoraharjo, Desa Kedungpendaringan, Desa Tegalsari, Desa Panggungrejo, Desa Mangunrejo, Desa Kemiri, Desa Jenggolo, Desa

Sengguruh, Desa Talangagung. Kecamatan Kepanjen memiliki luas lahan pertanian 2, 424.40 Ha.

Lahan pertanian di Kecamatan Kepanjen mempunyai sistem irigasi yang sangat baik, dengan ditetapkannya Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang dan dilewatinya Kecamatan Kepanjen sebagai jalan kolektor dari arah Kota Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lumajang yang memberikan dampak tidak langsung menjadikan Kecamatan Kepanjen sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pemerintahan yang menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen, memungkinkan pembangunan pelayanan dan kegiatan lainnya yang dibarengi dengan penataan ruang wilayah kabupaten.

Perubahan fungsi Kecamatan Kepanjen sebagai pusat pelayanan skala kabupaten mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dengan meningkatnya kebutuhan yang semakin tinggi dari sebelumnya dan menyebabkan meningkatnya aktivitas di wilayah tersebut. Hal ini akan berdampak pada penggunaan lahan sebagai tempat berjalannya suatu aktifitas. Persediaan lahan yang terbatas menyebabkan terjadinya kompetisi untuk mendapatkan lahan sehingga terjadi alih fungsi lahan dari suatu aktivitas menjadi kegiatan yang lebih produktif demi penunjang kebutuhan penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut apabila tidak di tata dengan baik akan menimbulkan perkembangan yang tidak terarah dan terjadinya penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Wilayah Perkotaan Kepanjen didominasi penggunaan lahan pertanian. Terkait dengan fungsinya Kecamatan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang maka dari itu fasilitas-fasilitas yang dikembangkan tidak hanya melayani penduduk lokal tetapi juga melayani penduduk regional Kabupaten Malang. Dalam perencanaan Perkotaan Kepanjen, akan dikembangkan fasilitas berupa pusat perdagangan skala kabupaten, pusat jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat peribadatan skala kabupaten, pusat perkantoran skala Kabupaten, dan pusat olahraga dan kesenian regional – nasional.

Terkait pemindahan ibukota Kabupaten Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen dimana akan adanya pembangunan perkantoran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan akan dikembangkannya fasilitas-fasilitas skala kabupaten di Kecamatan Kepanjen akan berdampak baik secara langsung maupun tidak

langsung pada pengurangan lahan produktif pertanian yang ada di wilayah Kepanjen. Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu wilayah sektor pertanian yang diandalkan di Kabupaten Malang dan untuk mendukung pelaksanaan pemindahan Ibukota agar tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemindahan Ibukota Kabupaten ini dalam implementasinya pasti terdapat faktor penghambat dan perlu adanya perbaikan. Maka penulis merumuskan masalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen.

Tujuan dari penelitian adalah berusaha untuk menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemindahan ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara akademis maupun praktis melalui Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen sebagai kabupaten baru.

Tinjauan Pustaka

A. Kebijakan Publik

kebijakan yang dikemukakan oleh Carl J. Frederick dalam Winarno (2005, h.19) yaitu "serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, berkelompok atau pemerintah yang berada dalam suatu lingkungan dan menunjukkan hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu". kebijakan publik merupakan suatu tindakan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi kepada publik.

B. Implementasi Kebijakan

Pendapat mengenai implementasi kebijakan menurut Soenkarno (2005, h.80) mengatakan bahwa, "Proses melaksanakan kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijakan itu, karena penerapannya (*aplication*) kebijakan itu adalah terhadap rakyat dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula" Implementasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan publik dimana dimulai dari pembuatan agenda kebijakan, perumusan, adopsi, sampai pada tahap evaluasi kebijakan.

1. Model-model Implementasi Kebijakan.

Tahapan dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik diantaranya:

a. Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Nugroho (2011, h.627), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- 1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2). Sumberdaya
- 3). Karakteristik Agen Pelaksana
- 4). Sikap/Kecenderungan (*Dispositon*) para pelaksana
- 5). Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivoitas Pelaksana
- 6). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
- 7). Kaitan antara komponen-komponen model

b. George C. Edward III

Edward melihat bahwa implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang dinamis, terdapat banyak variabel yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Dimana variabel-variabel tersebut perlu dilihat untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel yang ada terhadap implementasi. Dalam pendekatan George Edwart III menyebutkan ada empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014, h.149) yaitu:

1). Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi (Agustino, 2014, h.150). Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak akan terjadi kesalahan dalam menyampaikan berita apabila terdapat komunikasi yang baik oleh pemberi berita dan penerima berita. Komunikasi kebijakan adalah merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2010, h.97). Widodo juga menambahkan bahwa informasi penting disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi tujuan, isi, arah dan kelompok sasaran dari suatu

kebijakan yang dibuat. Agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi di atas. menurut Agustino (2014, h.150-151) ialah:

- a). Transmisi penyaluran komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi yang bagus. Namun adanya salah pengertian (miskomunikasi), menyebabkan suatu implementasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b). Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh *street-level-bureuacrats* harus jelas dan mudah dimengerti.
- c). Konsistensi. Intruksi yang diberikan dalam implementasi haruslah konsisten. Karena jikalau perintah yang diberikan sering berubah dapat menimbulkan kebingungan untuk pelaksana dilapangan.

2). Sumber daya

Variabel kedua adalah sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Sumber daya disini yang dimaksud adalah manusia yang ada kaitannya dengan suatu fungsi atau operasi. Menurut Widodo (2010, h.99-101) sumber daya yang dimaksudkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan fasilitas.

3) Disposisi atau sikap.

Disposisi, sikap dari implementator merupakan faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi keb. publik. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif, maka para pelaksana mengetahui apa yang akan dilakukan dan mampu untuk melaksanakannya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi menurut George C. Edward III sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014, h.152-153) adalah:

- a) Pengangkatan Birokrat, sikap para pelaksana dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan, karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana haruslah orang

yang punya dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan.

- b) Insentif, untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

4). Struktur Birokrasi

Menurut Edward III sebagaimana dikutip Agustino (2014, h.153) adalah sistem formal hubungan-hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas sejumlah orang atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama. yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi keb. publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu luas dibutuhkan adanya kerjasama banyak orang, apabila suatu instansi tidak kondusif, akan menyebabkan sebagian sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya peraturan. Pelaksana harus dapat mendukung keb. yang telah ditetapkan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan publik

Menurut Soenarko (2000, h.185) faktor-faktor penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 1). Teori yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat. 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 3) Sarana kurang dipergunakan secara maksimal. 4) Isi dari kebijakan bersifat tidak jelas atau samar-samar. 5) Ketidakpastian faktor *intern* dan faktor *ekstern*. 6) Kebijakan yang ditetapkan mengandung banyak lubang. 7) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumberdaya manusia). Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dapat dilihat bahwa sejak awal dibentuknya kebijakan tersebut tidak selalu disebabkan oleh sikap para pelaksana atau implementor yang tidak menguasai dan memahami kebijakan yang ada. Namun adanya pembentukan kebijakan yang kurang baik.

C. Ibukota Kabupaten

Dalam menentukan lokasi sebuah Ibukota Kabupaten perlu melihat beberapa faktor sebagaimana dikutip Ilhami (1990, h.38), mengemukakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dilihat dalam menentukan lokasi Ibukota

Kabupaten yaitu : 1) aspek strategis yang menyangkut kemudahan hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan dan adanya pengembangan kota-kota dan wilayah di Kabupaten yang bersangkutan dalam waktu jangka panjang. 2) aspek teknis lokasi Ibukota Kabupaten harus mempunyai kemudahan teknis seperti air, listrik, drainase, prasarana persampahan, telekomunikasi dan tersedianya lahan kosong untuk terselenggarakannya pembangunan Ibukota Kabupaten. 3) aspek administratif dimana dalam menentukan lokasi ibukota kabupaten mempertimbangkan kemudahan pengelolannya, kemampuan pembiayaan, dan aspek hukum.

D. Perubahan Tata Guna Lahan

Pengembangan Perencanaan pada suatu wilayah memerlukan tanah sebagai tempat pembangunan. Agar dapat memanfaatkan tanah secara efisien, maka terlebih dahulu harus memahami tentang pembangunan dan perencanaan wilayah. Sebagaimana pendapat Jayadinata (1999, h.265) bahwa “kontribusi yang paling penting dari perencanaan pengembangan wilayah atau ruang adalah adanya permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan yang berhubungan dengan perubahan dalam kawasan perkotaan dan pedesaan yang mempengaruhi pemanfaatan lahan”

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif Lebih lanjut, menurut Idrus (2007, h.29), “penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi” Pendekatan kualitatif Sejalan dengan itu Moleong (2014, h.6). Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dilihat dari lima variabel yaitu a) Pertimbangan Strategis Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang. b) Komunikasi dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2008 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. c) Pemanfaatan sumberdaya dalam implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. d) Sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. e) Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. 2) Bagaimanakah Faktor pendukung dan

penghambat implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang. Sumber data penelitian diperoleh dari informan (Pegawai Dinas terkait, dan masyarakat Kabupaten Malang), dokumentasi (dokumen yang menunjang, gambar,) dan tempat/peristiwa. Analisis data yang digunakan adalah *data analysis interactive model* Miles & Huberman dan Saldana (2014, h.14).

Pembahasan

1. Implementasi PP. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen.

a. Pertimbangan Strategis Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang

Secara faktual hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kepanjen layak untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Malang ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek strategis, aspek teknis dan aspek administratif. Sehingga pada tanggal 28 Februari 2008 Kepanjenditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten.

b. Komunikasi Dalam Implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen.

Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat di Kepanjen. Sosialisasi dan komunikasi juga dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait pemindahan Ibukota Kabupaten di Kepanjen. Meski sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya koordinasi, dan komunikasi formal dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten ke Kepanjen. Hal ini dikarenakan upaya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dianggap belum dapat memberikan pemahaman secara mendalam.

c. Pemanfaatan Sumberdaya dalam Implementasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen.

Kecamatan Kepanjen merupakan kawasan yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas hampir 80% lahan pertanian ada di Kecamatan Kepanjen. Kecamatan Kepanjen memiliki luas lahan pertanian 2,424.40 Ha. Selain itu dilewatinya Kecamatan Kepanjen sebagai jalan kolektor dari arah Kota Malang,

Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lumajang. Sehingga ketersediaan materiil tersebut dapat mendukung keberhasilan implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten. Maka berdasarkan hasil penemuan dilapangan, dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten di Kepanjen sumber daya sudah tersedia secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten.

d. Sikap para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen.

Selanjutnya hal penting dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten, adalah sikap para pelaksana kebijakan juga menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh ini adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen dapat diterima oleh para aparatur daerah Kabupaten Malang dengan baik, mereka mendukung implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing pada dinas yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sikap para pelaksana kebijakan yang baik dalam menjalankan tugasnya dapat mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang ada.

e. Struktur Birokrasi Dalam Mengimplementasikan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Di Kecamatan Kepanjen.

Birokrasi merupakan tempat untuk mengimplementasikan kebijakan. dalam implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten maka Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Bappeda sebagai organisasi yang mengkoordinator perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang. Sehingga untuk mendukung implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten maka Bappeda harus mempunyai struktur birokrasi yang jelas untuk mempermudah tugas, pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya dan untuk meningkatkan kinerjanya Bappeda Kabupaten Malang mempunyai laporan kinerja (LKj). Adanya LKj ini akan meningkatkan kinerja para pegawai dan mempermudah para pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugasnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen.

a. Faktor yang mendukung pelaksanaan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen

1). Dukungan Regulasi dari Pemerintah Daerah

Dukungan regulasi dari pemerintah daerah Kabupaten Malang terkait dengan pelaksanaan implementasi PP No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen berupa Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Dengan adanya dukungan regulasi berupa Perda tersebut dapat menjadi pedoman pengarah pengembangan perencanaan wilayah di Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.

2). Adanya Komunikasi Yang Baik Antar Pemangku Kepentingan.

Sejak ditetapkannya Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang telah dilakukan komunikasi dengan aktor-aktor terkait. Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara formal dengan adanya proses pengusulan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD untuk mendukung keberhasilan pemindahan Ibukota Kabupaten.

3). Adanya dukungan berupa ketersediaan lahan.

Ditetapkannya Kecamatan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang tidak bisa terlepas dari aspek sumberdaya. Berdasarkan Ketersediaan sumber daya disini dapat dilihat dari beberapa aspek, melalui ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya peralatan fasilitas dan dukungan berupa materil untuk menjalankan kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen. Selain letaknya yang strategi juga mempunyai akses jalan yang baik, dan juga masih terdapat banyak lahan yang belum dijadikan lahan terbangun. Sehingga

untuk mendukung pelaksanaan implementasi PP tersebut Kepanjen cukup menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan terbangun.

b. Faktor yang menghambat pelaksanaan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen.

1). Komitmen Pemerintah Daerah antara Dinas Pengairan dan Dinas Cipta Karya.

Setiap dinas dalam menjalankan tugas masih cenderung berjalan sendiri-sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku, meskipun begitu hal ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten, karena setiap instansi atau dinas mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang tidak dapat disamakan dengan semua dinas. Sehingga untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten ini diperlukan komitmen dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dapat tercapai dengan baik dan dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah yang ada.

2). Minimnya Anggaran

Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kepanjen seluruhnya di biayai oleh dana APBD Kabupaten Malang. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi pemindahan Ibukota tersebut anggaran yang telah ditetapkan masih sangat minim.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen telah memperhatikan aspek penting yaitu pertimbangan strategis penentuan calon Ibukota Kabupaten yang meliputi aspek teknis dan aspek administrative dan untuk mendukung implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten telah memperhatikan aspek komunikasi antar pemangku kepentingan, aspek ketersediaan sumber daya dan aspek sikap para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2014) **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta.
- Idrus, Muhammad. (2007) **Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**. Yogyakarta, UII Press.
- Jayadinata, J, T. (1999) **Tata Guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan & wilayah**. Bandung, ITB.
- Nugroho, Riant. (2011) **Publik policy**. Jakarta, PT. Media Elex Komputindo.
- Miles H.B, Huberman A.M & Saldana J. (2014) **Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)**. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [internet] Available from: http://www.sagepub.com/upm-data/55585_Chapter_1_Sample_Miles.Yogyakarta, UII PRESS

- Moleong, Lexy J. (2014) **Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi**. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Soenarko. (2000) **Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah**. Surabaya, Airlangga University Press.
- Soenkarno, (2005) **Public Policy**. Surabaya, Unair Press.
- Widodo, Joko. (2010) **Analisis Kebijakan Publik** Cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2005) **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta, Media Pressindo.